

Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antropologi Politik)

Devi Siswandani¹, Kuncoro Bayu Prasetyo²

¹Staf Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia
devisiswandani1998@gmail.com

²Departemen Sosiologi dan Antropologi, FIS, Universitas Negeri Semarang
mrbayu@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study examines the practice of village political leadership that has been dominated by a kinship network. A qualitative-ethnographic method was applied in this study to investigate kinship's structure and network, and its role in the village leadership. Data were collected through interview and observation. The study finds that the kinship network has been centered at the village head. This network has been deeply rooted and maintained over generations; and it has been the important social capital to win the village election. The kinship network has been the reference for recruitment and selections of village officials, strengthens the legitimacy of the village head power, facilitates the procedures of bureaucracy, and secured village head's policies. Furthermore, the kinship network has played a central role in legitimizing the political power of the village head. Through this network, the village leadership goes without turmoil. However, this type leadership has created a weak community participation in village governance.

Keywords: kinship network, local politics, power, rural community

Abstrak

Studi ini membahas praktik kepemimpinan politik desa yang didominasi oleh satu jaringan kekerabatan. Studi dilakukan dengan metode kualitatif etnografi untuk menelusuri struktur dan jejaring kekerabatan, serta perannya dalam kepemimpinan desa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa kepemimpinan desa dibangun berdasarkan jaringan kekerabatan yang berpusat pada kepala desa. Jaringan kekerabatan itu telah mengakar dan terstruktur dengan kuat selama beberapa generasi. Jaringan kekerabatan ini berperan penting sebagai modal sosial untuk memenangkan pemilihan kepala desa, menjadi dasar untuk perekrutan dan seleksi perangkat desa, memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa, memperlancar jalannya roda birokrasi, serta menjadi jaminan keamanan atas berbagai kebijakan kepala desa. Kekuasaan kepala desa dibangun oleh modal sosial berupa relasi-relasi dalam jejaring kekerabatan yang berperan sentral untuk mencapai dan melegitimasi kekuasaan politik kepala desa. Peran yang dimainkan jaringan kekerabatan tersebut mampu menciptakan kepemimpinan yang kuat tanpa gejolak. Namun, tipe kepemimpinan ini menciptakan partisipasi masyarakat yang lemah dalam tata kelola pemerintahan desa.

Kata kunci: jejaring kerabat, kuasa, masyarakat pedesaan, politik lokal

Pendahuluan

Masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional umumnya hidup berkelompok berdasarkan ikatan kekerabatan atau klan keluarga. Kelompok keluarga tersebut hidup bersama, saling membutuhkan, saling berinteraksi, dan membentuk jaringan persekutuan kelompok sosial berdasarkan ikatan genealogis. Kekerabatan pada masyarakat desa seringkali memiliki kaitan yang erat dengan konsep kekuasaan (Balandier, 1986:67).

Menurut Budiardjo (1995:35-77), kekuasaan dilihat sebagai kemampuan untuk memengaruhi individu atau kelompok lain agar bertindak seperti yang dikehendaki oleh individu atau kelompok yang berkuasa. Sistem kekuasaan di desa dijalankan oleh aparat pemerintahan desa yang bertugas mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat. Kepala desa memegang kekuasaan tertinggi. Ia dibantu oleh bendahara, sekretaris, dan jajaran perangkat desa lainnya dalam melayani masyarakat serta mengelola pembangunan desa (Masruhin *et al.*, 2015).

Di dalam perspektif antropologi politik, kekuasaan dan kekerabatan memiliki keterkaitan dan tidak dapat dianalisis secara terpisah, khususnya dalam politik lokal di desa atau pada masyarakat sederhana (Balandier, 1986:vi; Anggraini, 2013). Kajian Antropologi politik memperlihatkan adanya ikatan-ikatan kompleks antara kekuasaan dan kekerabatan. Di dalam seting pedesaan, kekerabatan merupakan salah satu nilai yang masih dijaga karena tingginya rasa solidaritas dalam kehidupan masyarakat desa. Faktor kekerabatan adalah unsur penting dalam sebuah kekuasaan di desa. Pendekatan tersebut menjelaskan adanya hubungan antara kekuasaan dan kekerabatan, sehingga kedua hal tersebut saling memengaruhi.

Studi Balandier (1986) pada orang Tonga di Malawi memperlihatkan kaitan antara kekuasaan, kekerabatan dan politik. Kekerabatan orang Tonga merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kekuasaan politik (Velsen dalam Balandier, 1986: 66). Selain studi ini, telah banyak pula penelitian yang menjelaskan keterkaitan positif antara kekuasaan dengan

kekerabatan. Keterkaitan antar keduanya mampu memperkuat kekuasaan (Corstange, 2018; Sutisna, 2017; Harjanto, 2011). Namun, ada pula penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan negatif antara kekerabatan dan kekuasaan. Kekerabatan justru sering kali menimbulkan konflik perebutan kekuasaan yang justru merusak relasi kekerabatan itu sendiri (Mulyanto dan Widada, 2016; Sumarlam, 2016; Widada dan Istadiyantha, 2021). Pada perkembangannya, relasi politik dan kerabat tidak hanya berlangsung pada politik tradisional. Pengaruh kekerabatan juga terlihat jelas pada politik modern melalui maraknya berbagai praktik politik dinasti di Indonesia pasca reformasi (Hidayati, 2014; Iskandar, 2015; Rachman, 2015; Susanti, 2017; Darmansyah dan Harirah, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa kekerabatan dan kekuasaan dapat berelasi secara positif dan integratif dalam upaya meneguhkan kekuasaan. Namun, dapat juga sebaliknya berelasi secara negatif dengan memicu disintegrasi berupa konflik dan perebutan kekuasaan di antara para kerabat itu sendiri.

Fenomena relasi kekuasaan dan kekerabatan juga masih banyak terjadi dalam kehidupan sosial politik masyarakat desa, salah satunya di Desa Banyulegi (*pseudonym*), di Jawa Tengah. Desa ini secara geografis berada di sebelah utara Gunung Ungaran dan secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Damayanti *et al.*, 2019). Desa Banyulegi terbagi dalam dua dusun yaitu Dusun Ndalem dan Dusun Njobo. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun Ndalem yang ditandai dengan adanya kantor kepala desa dan pasar desa. Menurut konsep lanskap budaya politik masyarakat Jawa, dusun yang menjadi pusat pemerintahan desa disebut dengan istilah Dusun *Krajan*.

Hubungan kekerabatan dan solidaritas masyarakat Desa Banyulegi masih terasa sangat kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa seperti gotong royong membersihkan makam, membangun sumber air, dan se-

bagainya. Beberapa kelompok kerabat yang memiliki hubungan darah dari beberapa generasi sebelumnya juga masih tinggal dalam satu lingkup area pemukiman yang sama. Dengan demikian, rata-rata masyarakat Desa Banyulegi masih saling berkerabat.

Kekerabatan di Desa Banyulegi tidak lepas dari konsep ikatan dalam keluarga Jawa yang dijelaskan oleh Hildred Geertz (1985) dalam bukunya "Keluarga Jawa". Pada buku itu, ia menjelaskan pertalian keluarga Jawa yang secara keseluruhan mempunyai ikatan-ikatan sosial ketat, khas, dan askriptif tapi hanya memainkan peranan sekunder dalam struktur masyarakatnya. Geertz menyebutkan bahwa keluarga Jawa memiliki ikatan komunalitas yang kuat. Hal serupa juga ditemukan di Banyulegi, di mana nilai-nilai kekeluargaan yang masih sangat kuat.

Kuatnya relasi kekerabatan dan solidaritas masyarakat juga tercermin dalam pola kepemimpinan di Desa Banyulegi, yang mana para perangkat desa masih saling memiliki hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya yaitu Kepala Desa Banyulegi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Dusun Ndalem yang merupakan bibinya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa relasi kekerabatan eksis dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi. Penelitian ini penting dilakukan karena di tengah masa politik demokrasi modern yang sudah merambah sampai tingkat desa, justru masih ditemukan fenomena politik kekerabatan yang mengakar di Pemerintahan Desa Banyulegi. Studi ini dilakukan untuk mengetahui peran jaringan kekerabatan dalam praktik politik lokal yang ada di Desa Banyulegi serta implikasinya bagi kehidupan sosial maupun tata kepemimpinan desa. Mengacu pada Balandier (1986:viii), praktik politik dapat diartikan sebagai persaingan kekuasaan serta upaya untuk mencapai dan menggunakan kekuasaan tersebut.

Perspektif Antropologi digunakan dalam melihat dan menganalisis fenomena politik kekerabatan di Desa Banyulegi agar memiliki sudut pandang berbeda dengan studi ilmu

politik murni. Studi-studi sebelumnya lebih banyak meneliti kepemimpinan dan kekerabatan menggunakan kacamata ilmu politik.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di desa tersebut adalah: 1) Kuatnya jaringan kekerabatan dan solidaritas masyarakat di Desa Banyulegi; 2) Desa Banyulegi memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda dengan desa lain karena didominasi oleh satu jaringan kekerabatan; 3) Kepala Desa Banyulegi juga telah menjabat selama lebih dari dua periode. Alasan lainnya adalah karena masih terbatasnya studi yang membahas politik kekerabatan di ranah desa dibandingkan studi sejenis di ranah pemerintahan daerah dan nasional serta ranah politik formal. Oleh sebab itu, studi ini dapat mengisi celah kekosongan dalam studi politik kekerabatan di ranah pedesaan yang lebih bersifat *daily politics* atau politik sehari-hari.

Kajian Pustaka

Studi tentang kekuasaan dan kekerabatan telah banyak dilakukan sebelumnya. Corstange (2018) meneliti peran kekerabatan dalam pemilihan anggota parlemen pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat di wilayah jazirah Arab dengan menggunakan data dari tujuh negara yaitu Kuwait, Aljazair, Libanon, Palestina, Yordania, Maroko, dan Yaman. Studi tersebut menunjukkan bahwa para kandidat menjadikan kekerabatan sebagai strategi untuk memenangkan pemungutan suara di Arab. Faktor kekeluargaan menentukan pilihan individu. Jaringan kekerabatan memfasilitasi akses ke sumber daya negara serta menjadi fasilitator yang lebih efektif daripada organisasi partai formal. Perilaku masyarakat dalam memilih kandidat yang memiliki ikatan keluarga disebabkan oleh budaya, kurangnya kesadaran politik, ketidakamanan fisik, dan lembaga pemerintahan yang lemah.

Pamungkas (2018) dalam studinya membahas tentang peran politik dinasti dalam memenangkan kandidat pada pilkada di Kabupaten Klaten. Hasil pilkada yang dimenangkan Sri Hartini dan Sri Mulyani menunjukkan masyarakat Kabupaten Klaten masih terpaku dalam

ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Kandidat mempunyai ikatan kekerabatan maupun ikatan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Ikatan tersebut menunjukkan praktik politik kekerabatan menjadi salah satu aspek yang digunakan dalam meneruskan rantai kekuasaan pada kursi jabatan tertinggi di Kabupaten Klaten. Budaya politik yang mendasari politik kekerabatan pada kasus pemilihan Sri Hartini dan Sri Mulyani adalah budaya politik patri-monialisme.

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Purwaningsih (2015) mengenai politik kekerabatan di Sulawesi Selatan menemukan terjadinya pewarisan ketertarikan pada politik melalui diskusi politik dalam keluarga. Pewarisan jaringan dan nama besar keluarga juga mempengaruhi dukungan publik kepada kandidat. Pilkada langsung dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar kepada keluarga politik untuk memperoleh atau memperbesar kekuasaannya, sehingga jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan politik semakin meningkat. Meski demikian, indeks kualitas kandidat dari keluarga politik cenderung menurun. Tidak semua kandidat yang berasal dari keluarga politik memiliki kualitas yang baik sebagai pemimpin. Hal ini dipengaruhi oleh semakin mudanya usia kandidat untuk memperoleh kekuasaan melalui peluang yang diberikan oleh partai-partai politik baru. Fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan merupakan salah satu gambaran melemahnya demokrasi di Indonesia.

Studi lainnya dilakukan oleh Gille (2018) pada peran politik lokal dan jaringan kasta dalam tindakan afirmatif di tiga desa India yaitu Karnataka, Andhra Pradesh, dan Maharashtra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasta yang rendah sangat sulit untuk mengakses sumber daya negara, contohnya untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat India memilih seorang *pradhan* atau kepala desa berdasarkan kesamaan kasta dengan harapan dapat membantu memperoleh pekerjaan. Di dalam praktiknya, kebijakan reservasi di sektor publik lebih bermanfaat bagi orang-orang yang

memiliki relasi atau kesamaan kasta dari pada masyarakat yang sangat miskin. Pemimpin lokal memberikan saluran informasi pekerjaan kepada sesama kastanya. Hal semacam ini disebut juga dengan “patronase” yang mana masyarakat akan memilih pemimpin yang berasal dari kasta yang sama dengan harapan akan mendapatkan posisi-posisi pekerjaan yang strategis di kemudian hari.

Menurut studi lain, jaringan kuasa politik kerabat juga dapat terbentuk melalui pola relasi patron klien sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terjadi dominasi Partai Golkar dalam pemilihan bupati maupun kursi parlemen lokal dalam setiap pemilu sejak orde baru hingga pasca reformasi. Hal itu disebabkan kedudukan sosial *ninik mamak* sebagai patron yang sangat dihormati dan diutamakan dipilih oleh kerabat dan tetangganya yang menjadi klien (Ansyari, *et al*, 2019). Keberadaan jejaring kerabat yang kuat dalam relasi sosial tersebut juga berlangsung pada masyarakat suku Gayo di Aceh. Terdapat konsep keberadaan *Belah* yaitu salah satu bentuk paruh kerabat yang dapat membangun solidaritas masyarakat dan dapat menjadi modal sosial dalam berbagai kehidupan sosial budaya masyarakat (Setyantoro *et al*, 2019)

Studi-studi yang telah dijelaskan di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu berusaha mendeskripsikan struktur jaringan relasi kekerabatan dalam kepemimpinan desa serta peran jaringan kekerabatan dalam politik lokal yang ada di Desa Banyulegi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2019 sampai Februari 2020. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Banyulegi. Peneliti memperoleh informan dengan cara *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap berkompeten dengan topik penelitian, serta para elit politik desa baik elit formal maupun informal seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan audio visual. Peneliti melakukan *live-in* di Desa Banyulegi, Kabupaten Kendal selama kurang lebih dua bulan dan menetap di rumah salah seorang perangkat desa perempuan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data juga dilakukan untuk menguji keabsahan data. Nama-nama informan dan nama tempat disamarkan di dalam artikel ini untuk melindungi privasi para informan dan menjaga keharmonisan desa.

Hasil dan Pembahasan

Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Perdesaan

Kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi terdiri atas kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal terdiri dari perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh tujuh perangkat desa. Sementara kepemimpinan informal meliputi keberadaan tokoh agama, kelompok tani, PKK, dan karang taruna Desa Banyulegi.

Ikatan kekerabatan ditemukan pada kepemimpinan formal dan informal antara kepala desa dan perangkat desa, kelompok tani, dan PKK. Kepala Desa Banyulegi telah menjabat selama tiga periode. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran jaringan kekerabatan yang dimiliki. Dari delapan orang jumlah perangkat desa, empat orang di antaranya masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Kepala Desa Banyulegi. Sementara empat orang lainnya tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan kepala desa. Keluarga menjadi prioritas utama untuk ditempatkan dalam kursi jabatan pemerintahan desa.

Kekerabatan dalam kepemimpinan di Desa Banyulegi berpusat pada Wibowo sebagai Kepala Desa Banyulegi. Tabel 1 menunjukkan daftar kerabat Wibowo yang memiliki jabatan di Pemerintahan Desa Banyulegi. Kakek buyutnya yang bernama Warno pernah menjabat sebagai *bekel*/kepala desa pada

masa kolonial. Dilanjutkan oleh kakeknya, Lagimin yang menjadi *bayan* tani dan Kartawi sebagai *bayan*/kepala dusun pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ayah Wibowo, yakni Priyono juga pernah menjadi Ketua RT Ndalem pada masa Orde Baru.

Lalu beberapa kerabat lain seperti bibi Wibowo, yaitu Lina menjabat Kepala Dusun II. Adik sepupunya, Jamal menjabat kaur keuangan; adik ipar Wibowo, Supri menjadi Ketua RT 05 dan Salam menjadi ketua BPD; Reza yang merupakan keponakannya menjadi kaur umum; Siti sebagai kakak ipar menjadi sekretaris desa tahun 2011-2016; dan istri Wibowo, Rahma, menjadi Ketua PKK Desa Banyulegi.

Nama	Jabatan	Hubungan dengan Kades
Warno	Bekel	Buyut
Lagimin	Bayan Tani	Kakek
Kartawi	Ketua RT	Kakek
Priyono	Ketua RT	Ayah
Siti	Sekretaris Desa	Kakak Ipar
Lina	Kepala Dusun	Bibi
Jamal	Kaur Keuangan	Adik Sepupu
Supri	Ketua RT	Adik Ipar
Reza	Kaur Umum	Keponakan
Salam	Ketua BPD	Adik Ipar
Rahma	Ketua PKK	Istri

Tabel 1. Struktur Jejaring Kerabat Kepala Desa Banyulegi

Sumber: Data primer

Ikatan kekerabatan Wibowo telah mengakar kuat dalam kepemimpinan di Desa Banyulegi. Jaringan kekerabatan yang dibangun menjamin adanya dukungan penuh terhadap kebijakannya sebagai kepala desa. Masa kepemimpinan Wibowo berlangsung selama tiga periode yang mana pada periode pertama dan kedua masing-masing berlangsung selama lima tahun. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa berubah menjadi enam tahun dalam satu periode. Artinya, Wibowo menjabat selama 16 tahun dan akan berakhir pada tahun 2022.

Jaringan kekerabatan memberikan andil yang penting bagi kepemimpinan yang ada di Desa Banyulegi. Berikut pengaruh kekerabatan Wibowo dalam kepemimpinannya di Desa Banyulegi.

Jaringan Kekerabatan Sebagai Modal Pemenangan Pemilihan Kepala Desa

Sebagai kepala desa, Wibowo telah menjabat selama tiga periode. Pada periode pertama dan kedua, ia adalah satu-satunya kandidat sehingga harus bertarung melawan kotak kosong. Hasilnya Wibowo menang melawan kotak kosong dan terpilih menjadi Kepala Desa Banyulegi. Pada periode ketiga di tahun 2017, Wibowo memiliki dua lawan politik yaitu Yadi dan Khasan yang merupakan kakak beradik asal Dusun Njobo. Akibat pemilihan kepala desa tersebut, hubungan kekerabatan Khasan dan Yadi mengalami kerenggangan karena saling bersaing untuk memperoleh suara.

Kerabat-kerabat Wibowo sebagian besar tinggal di Dusun Ndalem, sedangkan kerabat Yadi dan Khasan sebagian besar berada di Dusun Njobo. Jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat digunakan untuk memperoleh suara pada pemilihan kepala desa. Jumlah hak pilih penduduk Dusun Njobo lebih banyak dibandingkan penduduk Dusun Ndalem yaitu sebanyak 420 suara untuk Dusun Njobo dan 320 suara untuk Dusun Ndalem. Meski Dusun Njobo memiliki hak pilih yang lebih banyak, suara masyarakat Njobo terpecah untuk Yadi dan Khasan. Hal ini menyebabkan kerabat-kerabat bingung dalam menentukan pilihan antara Khasan atau Yadi mengingat keduanya adalah kakak beradik. Suara masyarakat Njobo yang terpecah menjadi dua kubu memberi keuntungan di pihak Wibowo. Dia dapat memaksimalkan jaringan kekerabatannya yang berada di Dusun Ndalem untuk meraih kemenangan suara.

Menjelang pemilihan kepala desa, Wibowo dan istrinya mengunjungi kediaman kerabat-kerabatnya secara langsung untuk meminta restu. Tujuan pertama kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi, lalu meminta restu kepada kerabat-kerabatnya dan

memohon dukungan untuk memilihnya pada Pilkades Banyulegi. Wibowo memiliki jaringan keluarga yang cukup luas di Dusun Ndalem. Bahkan, hampir seluruh warga Ndalem masih memiliki ikatan saudara dengan Wibowo.

Adanya relasi kekerabatan antara kandidat dengan masyarakat membuat masyarakat merasa *pakewuh* atau merasa tidak enak hati apabila tidak memilih kandidat tersebut. Kekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan seseorang yang telah menentukan pilihan dapat mengubah keputusannya dengan alasan kedekatan secara primordial. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang kerabat Wibowo:

“Asline ki aku sing paling wani nek ora ono ikatan kui mau mbak, tapi kan yo ora penak wong iseh sedulur.” (Sebenarnya saya adalah orang yang paling berani (kritis), akan tetapi karena ada ikatan saudara saya menjadi tidak enak jika tidak mendukung). – (Wawancara dengan Supri, 16 Februari 2020).

Supri adalah salah satu kerabat Wibowo yang sering kali berseberangan pemikiran ketika membahas berbagai masalah. Akan tetapi, pada saat Wibowo mencalonkan diri sebagai kepala desa, Supri menyatakan tetap mendukungnya karena rasa *pakewuh*. Hal serupa juga ditemukan dalam jawaban beberapa informan lainnya.

Jaringan Kekerabatan dalam Proses Rekrutmen Perangkat Desa

Kekerabatan tidak hanya berperan pada pemenangan Wibowo menjadi seorang kepala desa, tetapi juga sampai pada penentuan rekan kerja. Kepala Desa Banyulegi menempatkan beberapa kerabatnya pada jabatan pemerintahan desa. Relasi kekerabatan tersebut dilakukan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan (Muryanto, 2015).

Pemilihan kerabat untuk menduduki posisi dalam struktur pemerintahan desa di Banyulegi didasarkan pada hubungan timbal balik.

Keluarga yang memiliki peran yang cukup besar dalam memenangkan kepala desa diberikan imbalan berupa jabatan dalam pemerintahan desa. Selain itu, pemilihan kerabat dalam pemerintahan desa juga didasarkan pada struktur kekerabatan. Kepala desa memilih kerabat terdekatnya yang dipercaya dapat menduduki posisi dalam pemerintahan desa dan memiliki loyalitas. Pemilihan rekan kerja seperti ini juga dipengaruhi oleh perasaan lebih percaya terhadap kerabat dibandingkan orang yang bukan kerabat. Selain itu, kepala desa juga berharap mendapatkan kesetiaan dari bawahannya yang masih memiliki hubungan kerabat dengannya.

“Politik e kuat wong kae mbak, dibanding Pak kades luwih akeh pengalamane Jamal makane kon nyekel duit. Lha Jamal iku kan sepupune pak kades pokoke duit sing nyekel dekne mbak” (Politiknya orang itu (Pak Jamal) kuat mbak, dibandingkan dengan Pak Kades lebih banyak pengalaman Pak Jamal oleh karena itu disuruh memegang uang. Jamal itu kan sepupunya Pak Kades. Pokoknya uang yang memegang dia mbak). – (Wawancara dengan Abdul, 4 Februari 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas, kepala desa menempatkan kerabatnya pada kedudukan yang cukup strategis, salah satunya jabatan kaur keuangan yang diberikan kepada adik sepupunya yaitu Jamal. Kaur keuangan merupakan posisi yang cukup penting karena mengelola penggunaan dana desa. Penempatan kerabat dalam posisi strategis tersebut didasarkan atas kepercayaan bahwa kerabat akan dapat menutupi segala kekurangan kepala desa.

Sebanyak tujuh orang perangkat desa Banyulegi, tiga diantaranya merupakan kerabat dari Wibowo yaitu Jamal menjabat sebagai kaur keuangan, Lina menjabat sebagai Kepala Dusun II, dan Reza menjabat sebagai kaur umum. Wibowo meminta langsung kerabat-kerabatnya untuk menjadi rekan kerja di pemerintahan Desa Banyulegi.

“Awalnya karena saya aktif di PKK, karang taruna, dan kegiatan yang ada di kampung. Terus ada dorongan dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan keluarga. Akhirnya Ibu berminat. Dulu Ibu diminta sama Pak Kades untuk jadi perangkat desa. Kalau sekarang kan beda, yang menentukan nilai diseleksi mbak.” - (Wawancara dengan Lina, 7 Februari 2020).

Lina diminta langsung oleh Wibowo untuk menjadi kepala dusun. Situasi tersebut berbeda dengan saat ini karena peraturan baru mengharuskan seseorang mengikuti tes dan seleksi sebelum menjadi anggota perangkat desa. Peran Lina sebagai kepala dusun adalah melayani masyarakat serta ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Desa Banyulegi.

Memperkuat Legitimasi Kekuasaan Kepala Desa

Adanya unsur kekerabatan dalam pemerintahan desa memperkuat legitimasi kekuasaan Kepala Desa Banyulegi. Kerabat akan memberikan pengakuan dan dukungan kepada kepala desa karena memiliki ikatan keluarga. Status seorang kepala desa dianggap lebih tinggi, sehingga keputusan dan kebijakan kepala desa harus dihormati. Ikatan kekerabatan akan semakin memperkuat legitimasi kepala desa tersebut karena kerabat tidak hanya menganggapnya sebagai pemimpin desa. tetapi juga sebagai bagian dari keluarganya. Hal ini lah yang membuat kekerabatan semakin memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa.

“Sungkan ya itu ada mbak, saya rasakan. Misal mau berpendapat ini dan itu harus difikirkan lagi. Ya di desa segala keputusan kan harus tanya beliau, kita ndak berani kak kalau asal memutuskan. Tetapi beliau bagus kok, kalau ada apa-apa ya dimusyawarahkan. Beda pendapat kan wajar Mbak.” - (Wawancara dengan Lina, 7 Februari 2020).

Lina sangat menghormati Wibowo sebagai

seorang pemimpin Desa Banyulegi. Hal tersebut ditunjukkan pada saat proses pengambilan keputusan yang wajib melibatkan Wibowo sebagai pengambil keputusan. Meski Lina masih memiliki ikatan kekerabatan, ia tidak berani untuk mendahului kepala desa dalam pengambilan keputusan. Kepala desa adalah sosok yang harus dihormati, dan dianggap sebagai seseorang yang dapat memberikan keputusan terbaik.

Adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan desa juga memunculkan perasaan *ewuh pakewuh*. Perasaan ini menyebabkan seorang kerabat harus dapat menjaga sikap hormat terhadap atasannya, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin akan dihormati. Perasaan *ewuh pakewuh* yang muncul dalam diri individu juga disebabkan oleh adanya rasa takut dianggap tidak menghormati dan menghargai keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan yang selaras baik dalam ranah kerja sebagai atasan dan bawahan maupun dalam ranah keluarga.

Perangkat desa yang bukan kerabat juga memiliki rasa *ewuh pakewuh* terhadap kepala desa. Namun, ikatan kekerabatan membuat bawahan yang termasuk kerabat memiliki *ewuh pakewuh* yang lebih besar ketimbang dengan yang bukan kerabat. Oleh karena itu, adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan desa dapat memperkuat legitimasi kebijakan kepala desa. Demi menjaga hubungan kekerabatan antara bawahan dengan kepala desa, maka bawahan akan menghormati dan menerima kebijakan yang dibuat kepala desa.

Memperlancar Roda Birokrasi

Unsur kekerabatan dalam pemerintahan Desa Banyulegi juga mempermudah akses individu dalam memperoleh kedudukan. Contohnya adalah peran dan dukungan keluarga yang membuat Wibowo berhasil menjabat selama tiga periode berturut-turut. Keluarga turut andil dalam mengkampanyekan serta mengajak orang lain untuk memilih kandidat kepala desa.

Desa Banyulegi memiliki dua kelompok besar jaringan kekerabatan yang masing-masing mendiami satu dusun. Dusun Njobo banyak didominasi oleh jaringan kekerabatan Khasan dan Yadi yang merupakan lawan politik Wibowo. Sementara itu, Dusun Ndalem didominasi oleh jaringan kekerabatan Wibowo. Kedua dusun ini cenderung kurang memiliki kerjasama dan relasi yang intensif dalam berbagai dalam kegiatan desa. Hal tersebut dipengaruhi karena masing-masing dusun saling menjagokan kandidatnya ketika pilkades, sehingga muncul persaingan antar masyarakat kedua dusun yang saling mengunggulkan kandidatnya. Sebelum Wibowo menjabat sebagai kepala desa, kepemimpinan di Desa Banyulegi dikuasai oleh keluarga besar Karno dari Dusun Njobo. Kemudian, pada tahun 2006 Wibowo mencalonkan diri menjadi kepala desa. Pencalonannya didorong oleh dukungan keluarga dan masyarakat setempat yang menginginkan adanya perubahan dan berkurangnya dominasi kepemimpinan dari Dusun Njobo di Desa Banyulegi.

Jaringan kekerabatan berperan penting bagi dalam proses pemilihan Kepala Desa Banyulegi. Jumlah hak pilih warga Dusun Njobo sebanyak 420 dan Dusun Ndalem sebanyak 320. Namun, Dusun Njobo memiliki dua kandidat yaitu Khasan dan Yadi, sehingga suara masyarakat Njobo terpecah menjadi dua. Pecahnya suara masyarakat Njobo juga didasari oleh ikatan kekerabatan antara Khasan dan Yadi. Jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh Wibowo justru memperlancar roda kekuasaan pada pemerintahan desa. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan Wibowo selama tiga periode menjadi kepala desa.

Jaringan Kekerabatan Sebagai pengaman Kebijakan Kepala Desa

Kebijakan kepala desa sering kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Namun keberadaan jaringan kekerabatan dalam struktur kepemimpinan Desa Banyulegi bisa menjadi sumber keamanan bagi kebijakan yang dibuat. Adanya hubungan kekerabatan menjadi penyebab munculnya perasaan *ewuh pakewuh*

dalam pemerintahan desa. Terlebih lagi, kultur Jawa yang melekat dalam diri kerabat-kerabat tersebut semakin memperkuat rasa *pakewuh* atau tidak enak hati.

Pemerintahan Desa Banyulegi terdiri atas beberapa kerabat yang bertugas untuk mengatur pembangunan desa. Aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan adalah proses pengaturan anggaran atau keuangan desa. Pengaturan keuangan di Desa Banyulegi dipegang oleh Jamal sebagai Kepala Urusan Keuangan Banyulegi yang merupakan adik ipar dari Wibowo. Jabatan Jamal adalah posisi yang paling krusial mengingat laporan penggunaan dana nantinya juga akan dibuat oleh kaur keuangan.

Kekerabatan yang ada dalam pemerintahan desa akan sulit mengungkap adanya tindak penyelewengan anggaran desa, terlebih lagi jika kekerabatan tersebut bersifat tertutup. Posisi penting pemerintahan desa yang dipegang oleh orang-orang ikatan kekerabatan yang sama justru akan menutupi kekurangan-kekurangan atau tindakan yang menyalahi aturan. Hal ini yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan sebagai sumber keamanan kebijakan seorang kepala desa.

Jaringan Kekerabatan Sebagai Modal Sosial Kekuasaan

Berdasarkan penemuan di atas, kepala desa memiliki modal sosial berupa jaringan kekerabatan yang luas yang dimanfaatkan guna memperoleh kekuasaan di Desa Banyulegi. Bisa dikatakan bahwa salah satu potensi yang menentukan atau menjamin keberlangsungan kekuasaan seseorang adalah kemampuan mengelola sumber daya atau modal yang dimiliki. Relasi-relasi kekerabatan yang dimiliki Wibowo merupakan wujud dari modal sosial yang penting bagi para individu. Modal sosial ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam bertindak serta mempengaruhi kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Modal sosial berupa jaringan kekerabatan yang dimiliki Wibowo dimanfaatkan guna memperoleh kedudukan politik sebagai kepala desa.

Hubungan dalam jaringan memunculkan nilai dan norma yang terbentuk dengan sendirinya (Malik, 2015).

Sebagaimana dijelaskan oleh Portes (dikutip dari Usman, 2018: 8) bahwa ada dua kategori sumber modal sosial yaitu pola *consummentory* dan *instrumental*. Sumber modal sosial yang dimiliki oleh Pak Wibowo berpola *consummentory*, yang didasarkan atas solidaritas jaringan kekerabatan guna mencapai tujuan bersama yaitu memenangkannya pada pemilihan kepala desa. Hal tersebut dikarenakan pola *consummentory* mengedepankan modal sosial yang bersifat mengikat (*bonding*), salah satu cirinya terdapat pada ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dapat dikatakan mengikat (*bonding*) karena ikatan tersebut memiliki solidaritas yang tinggi dan kepercayaan yang kuat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Usman (2018:18), ada beberapa tipologi dalam jaringan modal sosial yaitu berdasarkan daerah (*locality*), kekerabatan (*kinship*), persamaan pandangan (*mind*), atau bisa campuran. Berdasarkan hal tersebut, jaringan modal sosial di Desa Banyulegi terbentuk atas relasi-relasi kekerabatan yang menempati jabatan-jabatan dalam birokrasi desa. Tipologi modal sosial yang dimiliki Kepala Desa Banyulegi didasarkan atas kekerabatan (*kinship*).

Berdasarkan analisis Pendekatan Genetik oleh Balandier (1986) menunjukkan bahwa kehidupan politik masyarakat Desa Banyulegi terbentuk atas jaringan kekerabatan. Kepala Desa Banyulegi yaitu Wibowo berasal dari keluarga yang cukup terhormat di desa. Hal ini ditunjukkan oleh sejarah para pendahulunya yang pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan kepala desa dalam memimpin diturunkan dari para pendahulunya.

Pencapaian Wibowo menjadi kepala desa juga didukung oleh jaringan kekerabatan yang cukup luas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kekerabatan dan kekuasaan. Keterkaitan antara kekerabatan dan kekuasaan dicontoh-

kan dengan politik orang Tonga di Malawi, yang mana kekerabatan merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kekuasaan politik (Velsen dalam Balandier, 1986: 66). Kekerabatan tidak hanya berperan penting pada kemenangan Wibowo dalam pilkades, tetapi juga sampai pada titik penentuan rekan kerja yang memprioritaskan kerabat atau keluarga. Kekuasaan di Desa Banyulegi terbentuk melalui relasi-relasi kekerabatan yang kemudian membentuk sebuah kekuasaan politik yang didominasi oleh jaringan kekerabatan Wibowo.

Simpulan

Kepemimpinan di Desa Banyulegi terbentuk atas relasi jaringan kekerabatan kepala desa yang telah mengakar dan terstruktur dengan kuat selama beberapa generasi. Jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan lokal di Desa Banyulegi berperan penting sebagai modal kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala desa, berperan dalam proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa, memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa, memperlancar jalannya roda birokrasi, serta sebagai jaminan keamanan atas berbagai kebijakan kepala desa. Fenomena kuasa kepala desa di Desa Banyulegi terbentuk oleh modal sosial berupa relasi-relasi kekerabatan (*kinship*) yang berperan sentral dalam mencapai dan melegitimasi kekuasaan politik kepala desa.

Keterkaitan antara kekuasaan dan kekerabatan di Desa Banyulegi menunjukkan relasi yang positif atau bersifat integrative. Kepala desa dan keluarganya memiliki peran sentral dalam tata pemerintahan di Desa Banyulegi baik di sektor pengambil kebijakan maupun sektor pengawas kebijakan. Mereka berperan dari puncak pemerintahan desa sampai level birokrasi paling bawah yaitu RT. Peran jaringan kekerabatan tersebut mampu menciptakan kepemimpinan yang kuat tanpa gejolak, tetapi menimbulkan efek samping yaitu lemahnya partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola desa.

Kasus di Desa Banyulegi menunjukkan bahwa fenomena politik pedesaan tidak cukup hanya didekati dalam perspektif ilmu politik saja

karena banyak aspek yang turut memberikan warna dalam praktik politik di desa. Pendekatan antropologi politik pada akhirnya dapat menganalisis secara lebih holistik bahwa pranata kekerabatan (*kinship*) masih menjadi faktor penting dalam menggerakkan dinamika politik pedesaan, khususnya di Desa Banyulegi.

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. (2013). Politik Kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik*, 1(2), 93-123. <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i2a4>
- Ansyari, I., Harsasto, P., dan Fitriyah, F. (2019). Analisis Patron Klien terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.3256/ijrs.v1i1.9>
- Balandier, G. (1986). *Antropologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Budiardjo, M. (1995). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Corstange, D. (2018). Kinship, Partisanship, and Patronage in Arab Elections. *Electoral Studies*, 52(2018), 58-72. <https://doi.org/10.1016/j.elecstud.2018.01.006>
- Damayanti, A. F., Saputri, N. C., Rifky, M., Luthfi, A., Gunawan, M., dan Rini, H. S. (2019). The Patron-Client Relations in the Distribution Chain of Coffee Products in Jambon Hamlet, Medono Village, Boja Sub-District of Kendal Regency BT - *Proceedings of the International Conference on Rural Studies in Asia (ICoRSIA 2018)*. 196-199. <https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.48>
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., dan Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34-46. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>
- Geertz, H. (1985). *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gille, V. (2018). Applying for social programs in India: Roles of local politics and caste networks in affirmative action. *Journal of Comparative Economics*, 46(2), 436-456. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.12.001>
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institutionalisation Partai Politik di Indonesia. *Analisis Csis*, 40(2), 138-159.
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengem-*

- bangan Rekeyasa dan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357>
- Iskandar, D. J. (2015). Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Politik Dinasti pada Pilkada di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 12(3), 529-548. <https://doi.org/10.31113/jia.v12i3.57>
- Malik, I. (2015). Modal Sosial Petani Cengkeh dalam Mendukung Usaha Pertanian Tanaman Cengkeh (Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas). *Solidarity*, 4(1), 1-12.
- Masruhin, M.F., Azhari, A.K., Boedijono. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 1-12.
- Mulyanto, M., dan Widada, S. M. (2016). Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan *Local Wisdom*. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 15(2). <https://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v15i2.66>
- Muryanto, A. (2015). Relasi Jaringan Organisasi Pemuda dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(1), 151-158. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2951>
- Pamungkas, C. P. (2018). Politik Kekerabatan di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3). Diambil dari <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1144299> (27 April 2020).
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97-123.
- Rachman, Y. (2015). Pilkada, Dinasti Politik di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus and Field, Aktor Politik dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan yang Melahirkan Dinasti Politik). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Setyantoro, A.S., Setiadi, S., dan Rosyid, N. (2019). Pemuda, Belah dan Solidaritas: Kajian Model Solidaritas Anak Muda Gayo. *Patra Widya* 20(2), 171-186. <https://doi.org/10.52829/pw.292>
- Sumarlam, S. (2016). Representasi kekuasaan melalui sabda raja pada teks berita mengenai konflik internal keraton Yogyakarta (Sebuah analisis wacana kritis). *Prosiding Prasasti*, 58-70. <https://doi.org/10.20961/pras.v0i0.1444>
- Susanti, M.H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119. <https://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(2) 100-120. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widada, S.M., dan Istadiyantha, I. (2021). Pemberdayaan *Local Wisdom* dalam Penyelesaian Konflik di Keraton Surakarta Hadiningrat. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 3(2), 77-98.